



DPRD: Segera Realisasikan Pembangunan dari APBD

KETAPANG, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang didesak segera merealisasikan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diingatkan, agar tidak 'main-main' dalam melaksanakan proses lelang kegiatan.

"Kenapa kita minta segera dilaksanakan? Karena sampai sekarang belum ada pembangunan yang dilaksanakan. Padahal harga satuan sudah diterbitkan BPKAD, dan proses penetapan APBD sudah lama selesai. Asistensi Gubernur sudah menjabarkan dan diasistensi semua dinas. Jadi seharusnya tidak ada alasan menunda kegiatan," kata Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, Senin (24/2).

Sholeh menilai, jika pelaksanaan pembangunan terlambat, maka akan berdampak pada banyak hal, mulai dari penyerapan anggaran yang minim hingga

proses pelaksanaan pekerjaan, khususnya pekerjaan lelang-lelang besar yang nantinya akan dikejar-kejar waktu, sehingga hasilnya tidak maksimal. "Kalau semua terlambat, nantinya akan berdampak pada pengerjaan, karena kita ketahui ada beberapa pekerjaan tidak maksimal akibat kendala cuaca. Seharusnya dengan kondisi itu harus disiasati, jangan sampai kendala-kendala seperti itu seolah sengaja diabaikan," ketusnya.

Selain itu, Sholeh mengingatkan pihak terkait, baik itu OPD maupun LPSE agar benar-benar menjalankan tugas dalam pelelangan dan tidak bermain-main. Tentunya agar siapapun pemenang lelang, benar-benar pihak yang dianggap mampu dan bertanggung jawab, agar hasil pekerjaan dapat maksimal. "Jangan cuma melihat dari penawaran terendah, atau karena kolega dan lainnya. Panitia harus selektif menentukan pemenang lelang dengan melihat kesiapan personel, kelengkapan alat

dan material, agar pekerjaan maksimal dan tidak terkendala," tegasnya.

Sholeh juga mendesak seluruh OPD agar mengedepankan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Sehingga tidak menimbulkan kesan, pembangunan hanya setengah-setengah dan tidak tuntas. "Jangan dikerjakan setengah-setengah yang azas manfaatnya tidak ada. Sudah banyak contoh yang ada di lapangan," tuturnya.

Sholeh mengaku, sebelumnya telah menyampaikan ke beberapa dinas dalam rapat antara Komisi IV dengan beberapa OPD. Selanjutnya, DPRD akan memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan oleh OPD. "Kalau ketahuan ada OPD yang lambat, tidak serius dalam menjalankan APBD 2020 dan abai terhadap kepentingan masyarakat banyak, tentu kami tidak segan meminta Bupati Ketapang mengganti dan me-nonjob-kan kepala dinas tersebut," tukasnya. (teo/yun)